

Evaluasi Transparansi Data Penerima Bansos di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara Ditinjau dari Nilai Kejujuran dan Keadilan Pancasila

Agnes Olivia Sitompul¹ Ririn Marlina Manullang² Putri Sinaga³ Kristin Manalu⁴
Parlaungan Gabriel Siahaan⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: agnesoliviasitompul1212@gmail.com¹ ririnmanullang89@gmail.com²
pvtrisng@gmail.com³ kristinmanalu08@gmail.com⁴ parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Bantuan sosial (Bansos) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu agar kesejahteraan sosial dapat terjaga secara merata. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan seperti ketidakakuratan data penerima, keterbatasan keterbukaan informasi, serta dugaan ketidaktepatan sasaran yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat di Kelurahan Sidorejo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi transparansi data penerima bansos serta menilai sejauh mana transparansi tersebut mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam Pancasila, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan agar penyaluran bansos lebih akuntabel, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik melalui partisipasi masyarakat, verifikasi data berkala, keterbukaan informasi, serta penguatan pengawasan.

Kata Kunci: Transparansi Bansos, Kejujuran, Keadilan

Abstract

Social assistance (bansos) is a government program aimed at assisting underprivileged communities to ensure equitable social welfare. However, its implementation still faces challenges such as inaccurate recipient data, limited information transparency, and allegations of inaccurate targeting, which can fuel social jealousy and undermine public trust in the government. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation of residents in Sidorejo Village. The purpose of this study was to analyze the implementation of social assistance recipient data transparency and assess the extent to which this transparency reflects the values of honesty and justice enshrined in Pancasila. It also provided recommendations for improvements to ensure more accountable, targeted, and effective distribution of social assistance, enhancing public trust through community participation, regular data verification, information transparency, and strengthened oversight.

Keywords: Social Assistance Transparency, Honesty, Justice



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

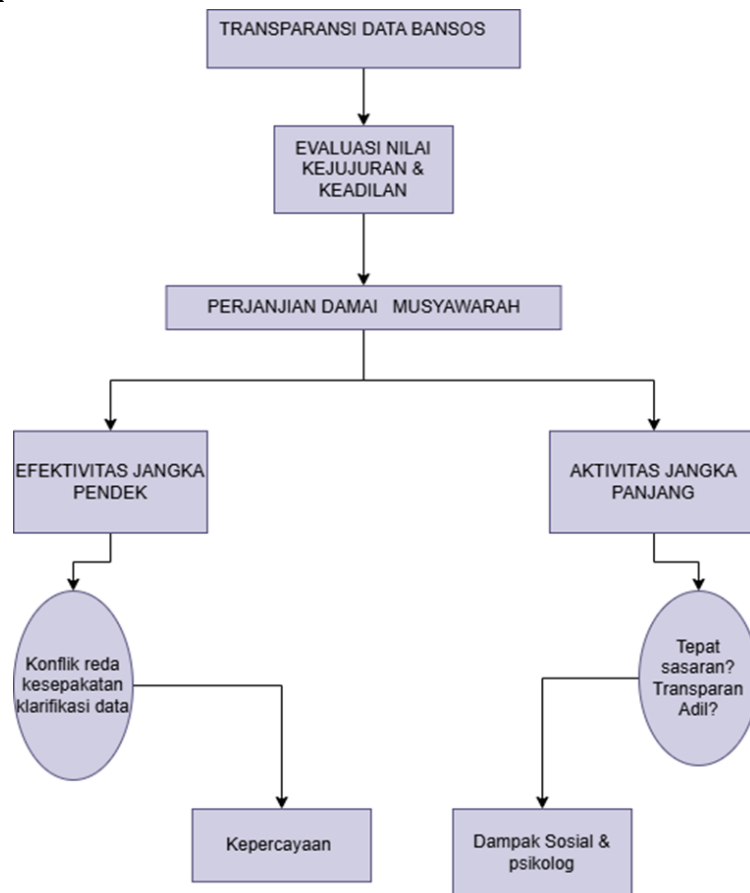
Di era modern saat ini, program bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan menjaga kesehatan masyarakat. Sebuah program yang dibuat untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap orang yang membutuhkan bantuan mendapatkannya dengan cara yang tepat sasaran (Nurrifqi et al., 2023). Kelurahan Sidorejo sebagai salah satu wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia menerapkan program bantuan sosial (bansos) untuk warga yang membutuhkan. Namun,

pendataan dan distribusi bansos masih menghadapi masalah, seperti data penerima yang tidak akurat, kurangnya transparansi, dan ketidakadilan dalam penyaluran. Transparansi data menjadi faktor penting agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran, karena masyarakat mengetahui kriteria penerima dan mekanisme penyaluran, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan (Abd et al., 2023). Selain itu, transparansi mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan, karena informasi yang benar disampaikan oleh pengelola dan setiap warga berhak menerima bantuan sesuai kriterianya. Hal ini penting mengingat kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks, mencakup aspek finansial, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang merata, yang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya (Jopinus, 2024)

Dalam konteks Pancasila, kejujuran dan keadilan merupakan nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sila Kedua menekankan kesejahteraan yang adil dan beradab, sedangkan Sila Kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pemerataan kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Sidorejo, ketidakakuratan target atau kurangnya transparansi menunjukkan ketidakseimbangan dalam penyaluran manfaat (Nuryanti Mustari, 2021). Oleh karena itu, evaluasi terhadap transparansi data penerima bansos penting dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran, sesuai dengan nilai kejujuran dan keadilan Pancasila, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan setiap warga, terutama kelompok yang membutuhkan, memperoleh hak yang adil sesuai kebutuhannya (Keindonesiaan, 2024). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana transparansi data penerima bansos di Kelurahan Sidorejo mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam Pancasila, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan program bantuan sosial (Juliana et al., 2023).

Identifikasi Masalah: Transparansi data penerima bantuan sosial di Kelurahan Sidorejo masih menghadapi beberapa permasalahan. Mekanisme pengumpulan, pencatatan, dan publikasi data penerima bansos belum sepenuhnya jelas dan transparan, sehingga perlu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana sistem yang ada berjalan efektif. Selain itu, pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pancasila, padahal prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan distribusi bansos berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem transparansi yang ada juga masih memiliki kelemahan, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan agar penyaluran bantuan sosial lebih akuntabel dan selaras dengan prinsip kejujuran dan keadilan Pancasila. Penelitian ini dibatasi pada transparansi data penerima bantuan sosial di Kelurahan Sidorejo. Dengan fokus penelitian meliputi mekanisme pengumpulan, pencatatan, dan publikasi data penerima bansos, serta sejauh mana transparansi tersebut mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam Pancasila. Rumusan Masalah: Bagaimana implementasi transparansi data penerima bantuan sosial di Kelurahan Sidorejo? Sejauh mana transparansi tersebut mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam Pancasila? Bagaimana evaluasi dan rekomendasi perbaikan terhadap sistem transparansi data penerima bansos agar selaras dengan nilai Pancasila? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan transparansi data penerima bantuan sosial di Kelurahan Sidorejo, dengan menilai sejauh mana sistem yang ada mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam Pancasila. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem transparansi dan merumuskan rekomendasi perbaikan agar penyaluran bansos lebih akuntabel dan sesuai prinsip kejujuran dan keadilan Pancasila.

Kerangka Berfikir



Gambar 1. Peta Konsep

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur hubungan antara permasalahan transparansi data penerima bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Sidorejo dengan upaya penyelesaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, khususnya kejujuran dan keadilan. Permasalahan awal yang muncul meliputi ketidakakuratan data penerima, kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan konflik sosial, kecemburuan masyarakat, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat kelurahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan evaluasi dengan menggunakan perspektif nilai kejujuran dan keadilan dalam Pancasila. Evaluasi ini bertujuan menilai apakah proses pendataan, verifikasi, hingga publikasi data penerima bansos telah dilakukan secara transparan, jujur, dan adil. Nilai kejujuran tercermin dari keterbukaan informasi dan kejujuran aparatatur dalam menyampaikan data, sedangkan nilai keadilan tercermin dari ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sebagai upaya penyelesaian masalah, ditempuh mekanisme musyawarah yang menghasilkan perjanjian damai antara pihak kelurahan dan masyarakat. Kesepakatan ini berisikan komitmen untuk memperbaiki sistem pendataan, membuka akses informasi publik, serta melakukan verifikasi ulang data penerima bansos. Musyawarah dipilih karena sejalan dengan nilai demokrasi Pancasila yang mengedepankan dialog dan mufakat. Dari proses penyelesaian tersebut kemudian dianalisis efektivitasnya dalam dua dimensi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, efektivitas diukur dari meredanya konflik, tercapainya kesepakatan formal, serta mulai terbangunnya kembali kepercayaan masyarakat. Sedangkan dalam jangka panjang, efektivitas dilihat dari keberlanjutan transparansi, ketepatan sasaran

bansos, serta pulihnya kondisi sosial dan psikologis masyarakat penerima. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa transparansi data bansos yang berlandaskan nilai kejujuran dan keadilan Pancasila, serta diselesaikan melalui musyawarah, diharapkan mampu menciptakan tata kelola bantuan sosial yang lebih adil, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Penelitian yang Relevan

1. Jurnal pertama berjudul "Transparansi Data Bansos dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik" Penyelesaian musyawarah atas permasalahan transparansi data penerima bantuan sosial (bansos) di tingkat kelurahan dilakukan sebagai langkah meredam konflik sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi bantuan. Permasalahan yang muncul meliputi dugaan ketidakterbukaan informasi, ketidaktepatan sasaran penerima, serta terbatasnya akses masyarakat dalam proses pendataan. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial menjadi faktor penting karena keterbukaan data dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mencegah terjadinya penyimpangan distribusi bantuan. Penelitian ini menegaskan bahwa publikasi data penerima secara terbuka mampu memperkuat kontrol sosial masyarakat dan menekan potensi konflik horizontal akibat kecemburuan sosial. Lebih lanjut, transparansi data tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan daftar nama penerima, tetapi juga mencakup keterbukaan mekanisme pendataan, kriteria kelayakan, serta alur verifikasi yang digunakan pemerintah kelurahan. Keterbukaan prosedural ini penting agar masyarakat memahami dasar penetapan penerima bansos sehingga dapat meminimalkan prasangka negatif terhadap aparat.

Dalam konteks administrasi publik, keterbukaan proses merupakan bagian dari prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas pelayanan publik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurangnya transparansi sering kali memicu disinformasi di tengah masyarakat. Ketika data penerima tidak dipublikasikan secara jelas, muncul asumsi adanya praktik pilih kasih, nepotisme, maupun manipulasi data. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama di lingkungan masyarakat dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi. Oleh sebab itu, publikasi data secara berkala melalui media yang mudah diakses menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Selain itu, transparansi berfungsi sebagai sarana edukasi publik mengenai keterbatasan kuota bantuan sosial. Tidak semua warga dapat menerima bantuan secara bersamaan karena adanya batasan anggaran dan prioritas kategori penerima. Dengan adanya keterbukaan data dan kriteria, masyarakat dapat memahami bahwa penetapan penerima didasarkan pada indikator objektif, seperti tingkat kemiskinan, kondisi pekerjaan, dan beban tanggungan keluarga. Pemahaman ini berkontribusi dalam menumbuhkan sikap empati sosial serta mengurangi kecemburuan di masyarakat. Implementasi transparansi juga berdampak pada meningkatnya partisipasi warga dalam proses pengawasan. Masyarakat dapat memberikan masukan, melaporkan ketidaksesuaian, maupun mengusulkan warga lain yang lebih layak. Fungsi kontrol sosial ini memperkuat sistem *checks and balances* antara pemerintah kelurahan dan masyarakat menekankan bahwa keterlibatan publik dalam mengawasi data bansos terbukti mampu meningkatkan akurasi penerima serta menekan potensi penyimpangan administratif. Di sisi lain, transparansi mendorong aparat kelurahan untuk bekerja lebih profesional dan berhati-hati dalam proses pendataan. Kesadaran bahwa data akan dipublikasikan membuat aparat terdorong menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, serta mengikuti prosedur yang berlaku. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berdampak eksternal pada masyarakat, tetapi juga internal terhadap peningkatan kinerja birokrasi. Dalam perspektif nilai Pancasila,

keterbukaan data bansos mencerminkan implementasi sila keempat dan kelima. Musyawarah publik dalam mengoreksi data merupakan wujud demokrasi deliberatif, sedangkan ketepatan sasaran bantuan mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga manifestasi nilai moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara keseluruhan, penelitian Arimbi ini menegaskan bahwa transparansi data bansos memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat pengawasan sosial, mencegah konflik, serta meningkatkan efektivitas distribusi bantuan. Tanpa keterbukaan informasi, program bansos rentan menimbulkan polemik dan menurunkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat (Arimbi, 2023).

2. Jurnal kedua berjudul "Akuntabilitas penyaluran bantuan sosial menjadi aspek krusial dalam penyelesaian permasalahan transparansi bansos di tingkat kelurahan. Melalui forum musyawarah, masyarakat menuntut adanya kejelasan pertanggungjawaban pemerintah kelurahan terkait proses pendataan, penetapan, hingga distribusi bantuan. Tuntutan ini muncul akibat adanya dugaan ketidaksesuaian data penerima serta minimnya informasi yang disampaikan kepada publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas yang berjalan belum sepenuhnya optimal dalam menjamin keterbukaan dan keadilan distribusi bantuan. Penelitian Untan menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam membangun akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Tanpa transparansi, proses pertanggungjawaban akan sulit diawasi masyarakat. Oleh karena itu, publikasi data penerima, besaran bantuan, jadwal penyaluran, serta mekanisme seleksi menjadi komponen penting yang harus disampaikan secara terbuka. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja pemerintah kelurahan. Lebih lanjut, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral aparatur kepada masyarakat. Aparatur kelurahan berkewajiban memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pelaporan dan dokumentasi sering menjadi celah terjadinya kesalahan distribusi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam praktiknya, penguatan akuntabilitas dilakukan melalui penyusunan laporan penyaluran bansos yang terdokumentasi secara sistematis. Laporan tersebut memuat daftar penerima, dasar penetapan, serta bukti penyaluran bantuan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang dapat diakses masyarakat apabila dibutuhkan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas berjalan secara simultan. Musyawarah kelurahan juga merekomendasikan pembentukan mekanisme audit sosial, yaitu proses evaluasi penyaluran bansos yang melibatkan masyarakat secara langsung. Audit sosial memungkinkan warga menilai kesesuaian antara data dan realitas lapangan. Penelitian ini menilai bahwa audit berbasis partisipasi publik efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menekan potensi penyimpangan. Selain itu, akuntabilitas diperkuat melalui kejelasan alur koordinasi antar-lembaga, seperti kelurahan, dinas sosial, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang lemah sering menyebabkan keterlambatan data, duplikasi penerima, maupun ketidaksinkronan informasi. Oleh sebab itu, integrasi data dan sistem pelaporan menjadi rekomendasi penting dalam penelitian tersebut. Dari perspektif tata kelola pemerintahan, akuntabilitas penyaluran bansos mencerminkan prinsip good governance yang menuntut adanya transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab publik. Pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan sosial harus mampu menunjukkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun etis. Secara

keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki hubungan erat dengan peningkatan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Semakin transparan informasi yang disampaikan, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat serta semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan distribusi bansos (Untan, 2024).

3. Jurnal yang ketiga berjudul “Permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam musyawarah penyelesaian konflik bansos di tingkat kelurahan”. Banyak ditemukan indikasi bahwa bantuan tidak sepenuhnya diterima oleh warga yang paling membutuhkan. Hal ini disebabkan oleh data yang tidak mutakhir, perubahan kondisi ekonomi masyarakat, serta keterbatasan proses verifikasi lapangan. Akibatnya, muncul kesalahan inklusi, yaitu warga tidak layak justru menerima bantuan, serta kesalahan eksklusi, yaitu warga layak tetapi tidak terdata sebagai penerima. Penelitian ini menegaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data merupakan tahapan krusial dalam menjamin ketepatan sasaran distribusi bansos. Data penerima tidak dapat hanya mengandalkan basis administrasi lama, melainkan harus diperbarui secara berkala melalui pengecekan faktual di lapangan. Tanpa pemutakhiran data, program bantuan sosial berisiko tidak efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam praktiknya, verifikasi dilakukan melalui survei langsung ke rumah warga guna menilai kondisi ekonomi riil, seperti pekerjaan, pendapatan, kondisi tempat tinggal, serta jumlah tanggungan keluarga. Pendekatan ini dinilai lebih objektif karena berbasis fakta lapangan, bukan sekadar dokumen administratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode survei lapangan mampu meningkatkan akurasi data penerima secara signifikan. Selain survei, proses validasi juga melibatkan usulan berjenjang dari aparat lingkungan, seperti RT dan RW. Aparat lingkungan dinilai memiliki pengetahuan sosial yang lebih mendalam mengenai kondisiarganya. Mereka mengetahui warga yang mengalami penurunan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau memiliki beban sosial tinggi. Keterlibatan struktur lokal ini menjadikan pendataan lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas masyarakat. Lebih lanjut, penelitian menekankan pentingnya membuka ruang laporan masyarakat dalam proses validasi data. Warga diberikan kesempatan untuk melaporkan apabila terdapat penerima yang tidak layak atau mengusulkan warga lain yang lebih membutuhkan. Mekanisme ini memperkuat fungsi kontrol sosial sekaligus meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Musyawarah kelurahan juga menyepakati bahwa proses pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala, bukan insidental. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pasca krisis ekonomi atau bencana. Oleh karena itu, pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan secara periodik agar distribusi bansos tetap relevan dan tepat sasaran. Di sisi lain, verifikasi berbasis partisipasi lingkungan juga berdampak pada meningkatnya legitimasi data. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pendataan, tingkat penerimaan sosial terhadap daftar penerima menjadi lebih tinggi. Konflik horizontal akibat kecemburuan sosial pun dapat diminimalkan karena keputusan dianggap dihasilkan secara kolektif. Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa verifikasi dan validasi data berbasis partisipasi lingkungan merupakan strategi efektif dalam meningkatkan akurasi penerima bansos. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki kualitas data, tetapi juga memperkuat nilai keadilan sosial dalam distribusi bantuan pemerintah (UIR, 2023).
4. Jurnal yang keempat berjudul “Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam penyelesaian permasalahan transparansi data penerima bantuan sosial di tingkat kelurahan”. Dalam forum musyawarah, warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki hak untuk mengawasi, menilai, serta memberikan masukan terhadap proses distribusi bansos. Keterlibatan ini muncul sebagai

respons atas adanya dugaan ketidaktepatan sasaran, kurangnya keterbukaan data, serta terbatasnya ruang pengaduan publik sebelumnya Penelitian menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan erat dengan tingkat akuntabilitas distribusi bantuan sosial. Semakin tinggi keterlibatan warga dalam proses pendataan, verifikasi, dan pengawasan, maka semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan. Partisipasi publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang melengkapi pengawasan formal pemerintah. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam forum musyawarah kelurahan, rapat RT/RW, serta kegiatan pendataan sosial. Melalui forum tersebut, warga dapat menyampaikan aspirasi, keberatan, maupun klarifikasi terkait daftar penerima bansos. Ruang dialog ini menjadi sarana demokratis untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Selain forum musyawarah, penelitian juga menyoroti pentingnya pembentukan mekanisme pengaduan masyarakat. Saluran pengaduan dapat berupa kotak saran, posko pengaduan, maupun layanan digital. Keberadaan kanal aduan ini memungkinkan masyarakat melaporkan ketidaksesuaian data, dugaan penyalahgunaan, maupun praktik diskriminatif dalam distribusi bantuan. Setiap laporan yang masuk perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti secara administratif agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Partisipasi masyarakat juga berperan dalam proses pemutakhiran data penerima bansos. Warga dapat mengusulkan individu atau keluarga yang dinilai lebih layak menerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Mekanisme usulan berbasis komunitas ini dinilai lebih akurat karena masyarakat memiliki kedekatan sosial dan memahami kondisi lingkungannya secara langsung. Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program bantuan sosial. Ketika warga dilibatkan, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan pemerintah serta ikut menjaga integritas distribusi bantuan. Sebaliknya, minimnya partisipasi justru berpotensi menimbulkan apatisme dan konflik sosial. Dari perspektif nilai Pancasila, partisipasi masyarakat mencerminkan implementasi sila keempat, yaitu musyawarah untuk mufakat. Keterlibatan warga dalam pengawasan bansos menunjukkan praktik demokrasi deliberatif di tingkat lokal, di mana keputusan publik dihasilkan melalui dialog dan kesepakatan bersama. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam mewujudkan transparansi dan keadilan distribusi bantuan sosial. Pengawasan berbasis komunitas tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial program bansos di mata masyarakat (IKHAC, 2022).

5. Jurnal yang kelima berjudul "Pengawasan merupakan elemen fundamental dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial di tingkat kelurahan". Dalam musyawarah penyelesaian konflik bansos, aspek pengawasan menjadi perhatian utama karena berbagai permasalahan sebelumnya, seperti dugaan manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, serta ketidaksesuaian prosedur distribusi. Tanpa sistem pengawasan yang jelas, program bantuan sosial rentan menimbulkan penyimpangan yang merugikan masyarakat. Penelitian menegaskan bahwa pengawasan dalam pengelolaan bansos harus dilakukan secara berlapis, meliputi pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh aparatur pemerintah melalui mekanisme administrasi, pelaporan, serta evaluasi kinerja penyaluran bantuan. Sementara itu, pengawasan eksternal melibatkan masyarakat, lembaga pengawas, serta pemerintah daerah sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran bantuan sosial. Dalam praktiknya, pengawasan administratif diwujudkan melalui pencatatan dan dokumentasi yang sistematis, mulai dari proses pendataan, penetapan penerima, hingga bukti penyaluran bantuan. Setiap tahapan harus memiliki arsip yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumentasi ini berfungsi sebagai alat audit apabila terjadi pemeriksaan atau aduan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem dokumentasi sering menjadi celah terjadinya penyimpangan distribusi bansos. Selain pengawasan administratif, musyawarah juga menekankan pentingnya monitoring lapangan secara berkala. Aparatur kelurahan bersama unsur masyarakat melakukan pengecekan langsung untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Monitoring ini penting untuk menghindari praktik perantara, pemotongan bantuan, maupun distribusi fiktif. Lebih lanjut, penelitian menyoroti perlunya penerapan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran. Sanksi tidak hanya bersifat administratif, seperti pencabutan bantuan atau revisi data, tetapi juga dapat berupa sanksi moral, teguran, hingga pelaporan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang. Penegakan sanksi dinilai penting untuk menjaga integritas sistem bantuan sosial serta memberikan efek jera. Musyawarah kelurahan juga menyepakati bahwa masyarakat berhak melaporkan setiap dugaan pelanggaran tanpa rasa takut. Perlindungan terhadap pelapor menjadi bagian dari sistem pengawasan partisipatif. Dengan adanya jaminan perlindungan, masyarakat lebih berani menyampaikan laporan sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini. Dari perspektif tata kelola pemerintahan, pengawasan dan sanksi merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas publik. Setiap penggunaan anggaran negara, termasuk bantuan sosial, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional. Hal ini sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila yang menuntut distribusi bantuan dilakukan secara jujur dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa pengawasan yang kuat disertai penerapan sanksi yang tegas merupakan kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kredibilitas pengelolaan bantuan sosial. Tanpa pengawasan yang efektif, program bansos berpotensi kehilangan legitimasi publik dan gagal mencapai tujuan kesejahteraan sosial (Intekom, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif yang bersifat Deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat terhadap transparansi data penerima bantuan sosial di Kelurahan Sidorejo ditinjau dari nilai kejujuran dan keadilan pancasila. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta mengaitkannnya dengan nilai-nilai Pancasila (Muhajirin et al., 2024). Adapun Teknik Pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini yaitu

1. Observasi. Observasi dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke Kelurahan Sidorejo untuk mengamati kondisi nyata terkait transparansi data penerima bantuan sosial. Melalui Observasi, peneliti memperhatikan situasi Lingkungan, interaksi masyarakat, serta Informasi yang tersedia mengenai penerima bansos. Hasil pengamatan ini digunakan sebagai data awal untuk memahami fenomenana yang terjadi dan menjadi pendukung bagi data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi (Sahir, 2022).
2. Wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Narasumber yaitu masyarakat Kelurahan Sidorejo menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara bersifat terstruktur agar peneliti tetap memiliki arah pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pendapat. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, serta penilaian masyarakat terhadap transparansi data penerima bantuan sosial ditinjau dari nilai kejujuran dan keadilan (Bambang Ariyanto, 2024).



Gambar 2.

3. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data pendukung yang relevan dengan penelitian, seperti foto kegiatan penelitian, video, serta rekaman suara hasil wawancara. Data dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara sehingga penelitian memiliki bukti pendukung yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Dr. Drs. H.Rifa'i Abubakar, 2021).

Penyajian data dalam penelitian ini menyoroti pandangan masyarakat Kelurahan Sidorejo mengenai transparansi data penerima bantuan sosial yang ditinjau dari nilai kejujuran dan keadilan Pancasila. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggambarkan pengalaman, pemahaman, serta penilaian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan ketepatan sasaran penerima bansos di lingkungan mereka. Lokasi penelitian merupakan tempat untuk memperoleh data, informasi, serta fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera sebagai tempat pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat setempat. Subjek Penelitian adalah individu, Kelompok, atau objek yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian kami adalah beberapa responden dari masyarakat di Kelurahan Sidorejo yang berjumlah lima orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Reduksi Data

Tabel 1.

No	Nama Responden	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	J. Marpaung (Warga)	1. Menurut Ibu, apakah pembagian Bansos sudah adil untuk warga yang benar-benar membutuhkan?	Tidak adil, buktinya saya yang kurang mampu, saya hanya ibu rumah tangga sesekali bekerja palingan hanya mengupas bawang, suami saya hanya tukang becak, tapi kami tidak ada dapat bantuan.
		2. Menurut Ibu, Apakah pihak Kelurahan sudah jujur terkait penyaluran Bansos?	Saya tidak tau jujur atau tidak, buktinya mereka beberapa kali terjun kelapangan melihat keadaan rumah saya, pekerjaan saya dan suami. tapi sampai saat ini saya tidak menerima Bansos.
		3. Apakah Menurut Ibu, Terdapat faktor kedekatan/hubungan keluarga dapat	Dapat, karena saya lihat juga pihak penyalur Bansos ini milih-milih, buktinya disana ada orang kaya, punya rumah mewah, punya kos-kosan 10 lantai, malahan mereka yang dapat

		memengaruhi penentuan penerima Bansos dilingkungan ini?	Bansos, padahal saya disini yang kurang mampu tidak dapat sama sekali.
2.	R. Tampubolon (Warga)	1. Apakah data penerima bantuan sosial di Kelurahan Sidorejo sudah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat? Jika belum, mengapa hal tersebut bisa terjadi?	Data penerima bantuan sosial sebenarnya sudah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal administrasi yang terkadang dipersulit sehingga masyarakat tidak selalu mudah mengakses informasi tersebut.
		2. Apakah Ibu pernah menemukan atau mendengar adanya masyarakat yang menerima bantuan sosial padahal dianggap kurang layak menerimanya? Bagaimana tanggapan Ibu terhadap hal tersebut?	Memang ada kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Ia pernah melihat adanya masyarakat yang tergolong mampu, bahkan memiliki mobil pribadi, tetapi tetap menerima bantuan. Sementara itu, masih ada masyarakat yang benar-benar kurang mampu namun tidak semuanya mendapatkan bantuan.
		3. Sejauh mana masyarakat dilibatkan atau diberi kesempatan untuk mengetahui dan mengawasi data penerima bantuan sosial di lingkungan ini?	Menurut beliau, keterlibatan masyarakat dalam mengetahui dan mengawasi data penerima bantuan sosial masih kurang maksimal. Sosialisasi mengenai bantuan sosial juga dinilai masih dilakukan secara tertutup sehingga tidak semua masyarakat mengetahui secara jelas proses maupun data penerimanya.
		4. Apakah aparat kelurahan sudah bersikap jujur dan transparan dalam proses pendataan dan penentuan penerima bantuan sosial? Mengapa Ibu berpendapat demikian?	Bu Tampubolon berpendapat meskipun data sudah diumumkan secara terbuka, prosesnya belum sepenuhnya transparan karena masih ditemukan masalah administrasi serta penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
		5. Apakah penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Sidorejo sudah mencerminkan nilai keadilan bagi seluruh masyarakat? Jelaskan alasan Ibu.	Menurut beliau, penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Hal ini karena masih ada masyarakat yang tergolong mampu menerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan.
		6. Jika ada masyarakat yang merasa tidak adil atau tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, apakah tersedia mekanisme pengaduan atau klarifikasi dari pihak kelurahan?	Berdasarkan pandangan Ibu R. Tampubolon, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam hal administrasi sehingga mekanisme pengaduan atau klarifikasi belum dirasakan berjalan dengan mudah oleh masyarakat
		7. Apa saja permasalahan utama yang menyebabkan data penerima bantuan sosial kurang transparan atau kurang tepat sasaran?	Menurut beliau, beberapa permasalahan utama antara lain adanya kendala administrasi yang dipersulit, kurangnya keterbukaan dalam sosialisasi kepada masyarakat, serta masih adanya penerima bantuan yang sebenarnya tergolong mampu.
		8. Bagaimana seharusnya pemerintah kelurahan memperbaiki sistem pendataan dan pengumuman penerima	Pemerintah kelurahan seharusnya melakukan pendataan yang lebih akurat serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar bantuan dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesan dipersulit dalam administrasi.

		bantuan sosial agar lebih jujur dan adil?	
		9. Apakah terdapat faktor kedekatan, hubungan keluarga, atau pengaruh tertentu yang memengaruhi penentuan penerima bantuan sosial?	Tidak secara langsung menyebutkan adanya faktor kedekatan atau hubungan keluarga, namun ia menyoroti adanya ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan bantuan yang menunjukkan kemungkinan adanya faktor lain yang memengaruhi proses penentuan penerima.
		10. Apakah keterbukaan informasi mengenai data penerima bantuan sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan? Jelaskan.	Keterbukaan informasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika data penerima bantuan disampaikan secara jelas dan terbuka serta penyalurannya tepat sasaran, masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah kelurahan.
3.	R. Sitohang (Warga)	1. Menurut Ibu, Apakah Pernah ada warga yang Mengeluh karena Merasa Pembagian Bansos Tidak tepat sasaran?	Itu kalau disuarakan pada Mereka, Mereka hanya mengatakan bahwa itu dari Pusat, Kemarin Rencananya anak saya ingin Kuliah, sudah dari awal diurus sampai kami pergi ke Dinas Sosial, dan dari Dinas Sosial, mengatakan bahwa Data ini Semua dari Kepling, Sementara Kepling mengatakan bahwa Data ini dari pusat jadi membingungkan.
		2. Apakah Menurut Ibu Mekanisme Pemberian Bansos Ini sudah berjalan dengan Baik?	Tidak Baik Menurut saya. Terkesan Bolak-balik. Bolak Baliknya, Mereka datang mendata kesini, Difoto rumah bagaimana Posisinya, Luar, dalam dan juga belakang, Tapi Tetap saja kami tidak dapat.
		3. Apa Harapan Ibu terhadap program bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran?	Ya Harapannya memang, betul-betul diberikan kalo memang seperti yang dikatakan, tukang becak, bangunan dan pekerja serabutan lainnya. Tapi pada kenyataannya tidak. Harapannya mereka benar-benar melakukan survei kepada masyarakat mana yang membutuhkan. Jangan sampai yang punya kost-kost an dapat. Ada kost-kost an 10 kamar tapi bisa dapat bansos.
4.	Tony Simorangkir (Warga)	1. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi tentang penerima bansos disampaikan secara terbuka kepada warga?	Kalau menurut saya sih sudah cukup terbuka, tapi mungkin belum semuanya tahu secara jelas. Biasanya informasi itu disampaikan lewat kepala lingkungan atau kadang ditempel di papan pengumuman. Tapi tidak semua warga datang melihat atau mendapat penjelasan langsung. Jadi ada juga warga yang merasa kurang tahu siapa saja yang menerima bantuan.
		2. Apakah pernah ada warga yang mengeluh karena merasa pembagian bansos tidak tepat sasaran?	"Iya, pernah. Beberapa warga memang pernah mengeluh karena mereka merasa ada orang yang ekonominya sudah cukup tapi masih menerima bansos. Biasanya keluhan itu disampaikan waktu kumpul warga atau langsung ke kepala lingkungan. Tapi saya juga memahami kalau menentukan siapa yang benar-benar berhak itu tidak mudah."
		3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan agar pembagian bansos ke depan bisa lebih adil dan terbuka?	Menurut saya sebaiknya data penerima bansos lebih sering diperbarui dan diumumkan secara terbuka supaya semua warga bisa melihat. Selain itu, mungkin kelurahan juga bisa mengajak warga untuk ikut memberi masukan

			kalau ada data yang kurang tepat. Dengan begitu pembagian bantuan bisa lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.”
5.	Morina Marbun (Warga)	1. Apakah Bapak/Ibu tahu ada bantuan sosial yang dibagikan di Kelurahan Sidorejo?	Iya, saya tahu ada bantuan sosial dari pemerintah yang dibagikan di kelurahan. Biasanya kami dengar informasinya dari kepala lingkungan atau dari tetangga. Kadang juga ada pemberitahuan waktu ada pertemuan warga .
		2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembagian bansos sudah adil untuk warga yang benar-benar membutuhkan?	“Kalau menurut saya, sebagian sudah cukup adil, karena memang ada warga yang benar-benar membutuhkan dan mereka menerima bantuan. Tapi mungkin masih ada beberapa yang menurut warga lain kurang tepat. Jadi menurut saya masih perlu diperbaiki lagi supaya yang menerima benar-benar yang paling membutuhkan.”
		3. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi tentang penerima bansos disampaikan secara terbuka kepada warga?	“Informasinya sebenarnya ada, tapi mungkin tidak semua warga mengetahuinya secara jelas. Biasanya hanya disampaikan lewat kepala lingkungan atau saat ada pengumuman tertentu. Jadi ada juga warga yang merasa kurang tahu siapa saja yang menerima bantuan.”

Display Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Peneliti mewawancarai Responden secara satu per satu, untuk mengetahui pandangan mereka mengenai transparansi data penerima bantuan sosial (bansos) serta sejauh mana penyalurannya mencerminkan nilai kejujuran dan Keadilan dalam Pancasila. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, diperoleh beberapa temuan penting mengenai persepsi masyarakat terhadap transparansi dan keadilan dalam penyaluran bansos di lingkungan mereka. Menurut J.Marpaung, Seorang warga Kelurahan Sidorejo, Pembagian bansos dinilai belum adil bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menyampaikan bahwa dirinya yang hanya bekerja serabutan sebagai pengupas bawang, sementara suaminya bekerja sebagai tukang becak, hingga saat ini belum pernah menerima bantuan sosial. Padahal menurut pengamatannya, terdapat warga yang secara ekonomi tergolong mampu namun justru menerima bantuan. Hal tersebut membuatnya merasa bahwa pembagian bansos masih belum tepat sasaran dan menimbulkan kesan adanya pemilihan penerima yang tidak adil. Hal yang hampir serupa disampaikan oleh R.Tampubolon, yang berpendapat bahwa meskipun data penerima bantuan sosial telah diumumkan kepada masyarakat, prosesnya belum sepenuhnya transparan. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat kendala administrasi yang membuat masyarakat sulit mengakses informasi secara jelas. Selain itu, ia juga melihat adanya kasus di mana masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu tetap menerima bantuan, sementara sebagian warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkannya. Menurutnya keterbukaan informasi yang lebih jelas dan pendataan yang lebih akurat diperlukan agar program bansos dapat berjalan lebih adil dan tepat sasaran.

Sementara itu, R. Sitohang menyampaikan bahwa mekanisme pemberian bansos di lingkungan tersebut masih belum berjalan dengan baik. Ia menjelaskan bahwa petugas pernah beberapa kali datang melakukan pendataan dengan memeriksa kondisi rumah serta pekerjaan keluarganya. Namun, meskipun proses pendataan telah dilakukan, ia dan keluarganya tetap tidak menerima bantuan sosial. Hal ini membuatnya merasa bingung mengenai mekanisme

penentuan penerima bantuan. Ia berharap agar pemerintah benar-benar melakukan survei lapangan secara objektif sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti pekerja serabutan, tukang becak, atau buruh harian. Pandangan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Tony Simorangkir, yang menilai bahwa informasi mengenai bansos sebenarnya sudah cukup terbuka. Menurutnya Informasi mengenai penerima bantuan biasanya disampaikan melalui kepala lingkungan atau melalui papan pengumuman di lingkungan kelurahan. Namun demikian, ia juga mengakui bahwa tidak semua warga mengetahui informasi tersebut secara jelas karena tidak semua masyarakat mengikuti pertemuan warga atau melihat pengumuman yang disampaikan. Akibatnya masih ada sebagian masyarakat yang merasa kurang mengetahui secara pasti siapa saja yang menerima bantuan sosial di lingkungan mereka.

Selain itu, Morina Marbun, salah satu warga Kelurahan Sidorejo, Menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya program bantuan sosial dari pemerintah yang dibagikan kepada masyarakat. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari kepala lingkungan ataupun dari pembicaraan antarwarga. Menurutnya, pembagian bansos sebagian sudah cukup membantu masyarakat yang membutuhkan, namun ia juga menilai bahwa masih terdapat beberapa kasus yang dianggap kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan pendataan yang lebih baik serta menyampaikan informasi secara lebih terbuka agar masyarakat dapat memahami proses penentuan penerima secara lebih jelas. Berdasarkan berbagai pandangan responden tersebut, dapat dilihat bahwa transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial masih menjadi perhatian masyarakat di Kelurahan Sidorejo. Sebagian masyarakat menilai bahwa pembagian bansos belum sepenuhnya tepat sasaran, sementara sebagian lainnya menilai bahwa informasi mengenai bansos sudah tersedia tetapi belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh warga. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan keterbukaan informasi, akurasi pendataan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih adil, transparansi, dan sesuai dengan nilai kejujuran serta keadilan dalam Pancasila.

Verifikasi Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai pandangan masyarakat terkait transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Sebagian masyarakat menilai bahwa pembagian bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum mendapatkannya. Beberapa responden menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi menerima bantuan sosial, sementara sebagian warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pendataan penerima bantuan sosial masih perlu diperbaiki agar lebih akurat dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Selain itu, sebagian masyarakat juga merasa bahwa informasi mengenai penerima bantuan sosial belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh warga. Hal ini membuat masyarakat berharap agar pemerintah dan pihak terkait dapat meningkatkan keterbukaan informasi serta melakukan pendataan yang lebih jelas dan objektif. Oleh karena itu, Masyarakat berharap agar pemerintah dapat memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial sehingga program bansos dapat berjalan lebih adil, transparan, dan tepat sasaran, serta benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan lima orang di desa Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, tampaknya masyarakat masih belum sepenuhnya merasa bahwa bantuan sosial disalurkan dengan cara yang transparan. Para responden mengatakan bahwa tidak semua warga memahami dengan jelas siapa yang menerima bantuan sosial. Meskipun informasi dikirim melalui kepala lingkungan atau papan pengumuman, tidak semua orang di komunitas tersebut mendapatkan atau sepenuhnya memahami informasi tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi tentang data penerima bantuan sosial masih belum transparan yang membuat sebagian orang merasa kurang memahami bagaimana prosesnya berjalan. Situasi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi tentang data penerima bantuan sosial masih kurang berjalan seperti yang seharusnya. Selain itu, beberapa responden juga menyampaikan bahwa masih terdapat dugaan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Ada masyarakat yang dinilai lebih layak menerima bantuan namun tidak terdaftar sebagai penerima sementara ada juga yang dianggap kurang layak seperti masyarakat yang tergolong mampu & mempunyai kendaraan mobil pribadi tetapi mendapatkan bantuan. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa proses pendataan dan penentuan penerima bantuan sosial belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya proses pendataan yang lebih akurat agar bantuan benar-benar diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

Di sisi lain, beberapa responden menyatakan bahwa pemerintah kelurahan sudah berusaha melakukan pendataan dan penyaluran bantuan sosial dengan cara yang benar. Akan tetapi, karena informasi yang disampaikan kepada masyarakat terbatas, proses ini tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang cara pendataan dan penyaluran bantuan sosial juga membuat masyarakat merasa tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi data penerima bantuan sosial masih perlu ditingkatkan. Informasi tentang bantuan sosial harus lebih terbuka dan jelas, sehingga masyarakat dapat memahami proses pendataan dengan baik. Selain itu, komunikasi antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat juga harus diperbaiki agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan adil. Dengan demikian, nilai kejujuran dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila dapat terwujud dalam penyaluran bantuan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transparansi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun informasi terkait bantuan sosial telah disampaikan melalui kepala lingkungan maupun papan pengumuman, namun belum seluruh masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi tersebut secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keterbukaan informasi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dari hasil wawancara ditemukan bahwa penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih terdapat masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan namun tidak terdaftar, sementara ada juga masyarakat yang tergolong mampu justru menerima bantuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pendataan dan verifikasi penerima bansos belum sepenuhnya akurat dan belum mencerminkan nilai keadilan. Dari sisi nilai Pancasila, khususnya kejujuran dan keadilan, implementasi transparansi bansos di Kelurahan Sidorejo belum sepenuhnya tercapai. Kurangnya keterbukaan informasi, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta ketidaktepatan sasaran menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan keadilan masih perlu diperkuat dalam praktik penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan dalam sistem transparansi, pendataan, serta pengawasan agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih adil, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Saran

Bagi Kelurahan (Pengelola Bansos) Pemerintah diharapkan dapat membuat penyaluran bansos lebih terbuka dengan mengumumkan nama penerima agar lebih mudah diketahui masyarakat. Data juga perlu diperbarui secara berkala melalui verifikasi langsung di lapangan agar bantuan sampai pada orang yang tepat. Pengawasan juga harus diperkuat dan mekanisme yang disediakan pengaduan yang jelas agar masyarakat dapat melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian. Bagi Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pengumpulan data dan pemantauan. Penyaluran bantuan sosial dengan memberikan informasi yang jujur tentang kondisi ekonomi. Masyarakat juga harus ikut serta dalam pertemuan atau forum komunitas dan cukup berani untuk berbicara atau melaporkan ketidakadilan apa pun yang mereka rasa dalam distribusi bantuan. dalam distribusi bantuan. Bagi Mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi sebagai agen kontrol sosial dengan melakukan edukasi masyarakat terkait pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pendataan bansos. Mahasiswa juga dapat melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat untuk membantu memperbaiki sistem pendataan dan pengawasan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, A., Amanda, M., Nabila, S., Alfia, N., Siti, I., & Arimbi, N. (2023). *Hakikat Manusia Dalam Pandangan Islam : Kesejahteraan dan Kesenjangan*. 12(2), 1–14.
- Bambang Ariyanto. (2024). *Teknik wawancara*.
- Dr. Drs. H.Rifa'i Abubakar, M. A. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*.
- Jopinus, S. (2024). *Evaluasi Efektivitas Bantuan Sosial Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan*. 7, 1175–1185.
- Juliana, B., Putri, E. R., & Karunia, N. (2023). *Implementasi Sila Ke-5 Pancasila Bagi Kesejahteraan Masyarakat*. 2(4), 290–298.
- Keindonesiaan, J. (2024). *PANCASILA : Jurnal Keindonesiaan*. 4(2).
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Kuantitatif. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- Nurriq, H., Fikrillah, F., Hudawiguna, S., Juliane, C., Studi, P., Sistem, R., Bayes, N., & Bansos, P. (2023). *Klasifikasi Penerima Bansos Menggunakan Algoritma Naive Bayes*. 10(1), 683–695.
- Nurul Atika. (2023). *Transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare)*.
- Abd, A., Amanda, M., Nabila, S., Alfia, N., Siti, I., & Arimbi, N. (2023). *Hakikat Manusia Dalam Pandangan Islam : Kesejahteraan dan Kesenjangan*. 12(2), 1–14.
- Nuryanti Mustari. (2021). : *Journal of Government Studies Vol.1 No.2 2021 Available Online at <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology> ISSN (Online): 2807-758X*. 1(2), 104–117.
- Prasetyo, D., Sa'adah, N., & Azhar, M. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di Kantor Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal*. Diponegoro Law Journal, 11(2).
- Rosfadhila, M., Toyamah, N., Sulaksono, B., Devina, S., Sodo, R. J., & Syukri, M. (2011). *Kajian cepat pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) 2008 dan evaluasi penerima program BLT 2005 di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr.Ir.Try Koryati (ed.)). Penerbit KBM Indonesia
- Ulpa, S. M., & Martiningish, Rr. S. P. (2025). *Akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial program keluarga harapan (Configurative Ideographic Study pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur)*. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 9(1), 85–97.